

## **PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI TERHADAP RASIO PERTUMBUHAN APBD KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2009-2014**

Dudi Rahmat Hidayat  
Universitas Singaperbangsa Karawang

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat melalui Rasio Kemandirian keuangan daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi keuangan daerah terhadap Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Karawang. Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan analisis surplus pendapatan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Setelah pengurangan dengan beberapa kriteria, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD Kabupaten Karawang pada rencana dan realisasi keuangan bulanan pada tahun 2009 sampai dengan 2014 selama 6 tahun. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 21.0.

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji-t dan uji-f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan secara simultan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan dengan diperoleh hasil  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $8,305 > 2,76$ ). Jika dianalisis secara parsial, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial. Sedangkan untuk rasio efisiensi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah berpengaruh secara parsial.

**Kata Kunci:** *Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan*

### **PENDAHULUAN**

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2002:42)

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. (Mardiasmo, 2002:121).

Indikator kinerja keuangan daerah dapat dijadikan evaluasi dan sebagai pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004:150-158).

Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Indikator dari kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktivitas, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Sedangkan indikator dari kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio derajat otonomi fiskal dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR).

## KAJIAN TEORI

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008: 230). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2008: 231-232).

Menurut Mamesah (Halim 2008: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini Bastian (2001) dalam Moito (2010) menyatakan persektif kedepan dari sistem keuangan daerah adalah mewujudkan sistem perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Halim (2008: 25) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Karawang 2009-2014

Tahun	APBD (Rupiah)	Persentase (%) Pertumbuhan APBD
2009	1.357.708.464.009	-
2010	1.622.759.874.491	19,52
2011	2.022.376.611.223	24,63

2012	2.461.055.535.050	21,69
2013	2.691.829.177.177	9,38
2014	3.198.292.288.528	18,81

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karawang 2015, diolah

Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Karawang 2009-2014

Tahun	APBD	PAD	Persentase (%) PAD terhadap APBD
2009	1.357.708.464.009	135.599.465.640	9,99
2010	1.622.759.874.491	210.282.788.665	12,96
2011	2.022.376.611.223	378.630.051.818	18,72
2012	2.461.055.535.050	658.597.372.181	26,76
2013	2.691.829.177.177	660.841.119.615	24,55
2014	3.198.292.288.528	909.158.490.944	28,43

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karawang 2015, diolah

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Arikunto (2009:234) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
1	rasio pertumbuhan APBD (Y)	mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. (Halim 2008: 235)	$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$	(%)
2	rasio kemandirian keuangan daerah (X1)	kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.	$\text{Rasio Kemandirian PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$	%

3	rasio efektivitas keuangan daerah (X2)	kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.	<b>Rasio Efektivitas Realisasi Penerimaan PA</b> = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PA}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	%
4	X <sub>3</sub> (rasio efisiensi keuangan daerah)	rasio yang menggambarkan perbandingan antara <i>output</i> dan <i>input</i> atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.	<b>Rasio Efisiensi Total Realisasi Belanja</b> = $\frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}}$	%

Sumber : Halim, 2008

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data berupa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karawang periode tahun 2009 sampai dengan 2014. Sumber data dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang.

Penentuan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD Kabupaten Karawang baik rencana maupun realisasi bulanan pada tahun 2009 sampai dengan 2014 yaitu selama 6 tahun. Sehingga data yang tersedia untuk diteliti adalah sebanyak 72 data. Sampel data pada penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2010:85) *sampling purposive* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, data yang dijadikan sampel pada penelitian ini tidak menggunakan laporan bulan Januari dan Februari setiap tahunnya dengan pertimbangan bahwa pada bulan tersebut RAPBD belum disahkan, oleh karena itu sampel data adalah 60 data.

Teknik Pengumpulan Data terdiri dari :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti terdiri atas :

1. Uji Multikolinieritas (*Ragnar Frisch*)
2. Uji Heteroskedastisitas (*Gletsjer*)
3. Uji Uji Autokorelasi (*Durbin Watson*)

Analisis dan Uji Hipotesis antara lain :

1. Analisa Regresi Sederhana dan Berganda  
 Regresi Sederhana :  $Y = \alpha + \beta X$   
 Regresi Berganda :  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$
2. Analisa Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Hipotesis

## 1. Uji t-Statistik

Rumus uji t-statistik menurut Sugiyono, (2010:230)

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = uji t-statistik

n = jumlah data

r = koefisien korelasi parsial

## 2. Uji F-Statistik

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

$R^2$  = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Keabsahan data terdiri dari :

## 1. Uji Normalitas

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji distribusi data dalam model regresi linier. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan ketentuan jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari signifikansi yang telah ditetapkan ( $\alpha$ ), maka dinyatakan model berdistribusi normal.

Tabel 4.1. Uji *Kolmogorov-Smirnov*

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	1,244
Asymp. Sig (2-tailed)	0,090

Sumber : Output SPSS

Dari Tabel 4.1 didapat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* unstandardized residual  $> \alpha$  (0,05) yaitu  $0,090 > 0,05$  yang artinya model regresi berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Tabel 4.2. Uji Multikolinearitas Variabel Dependen

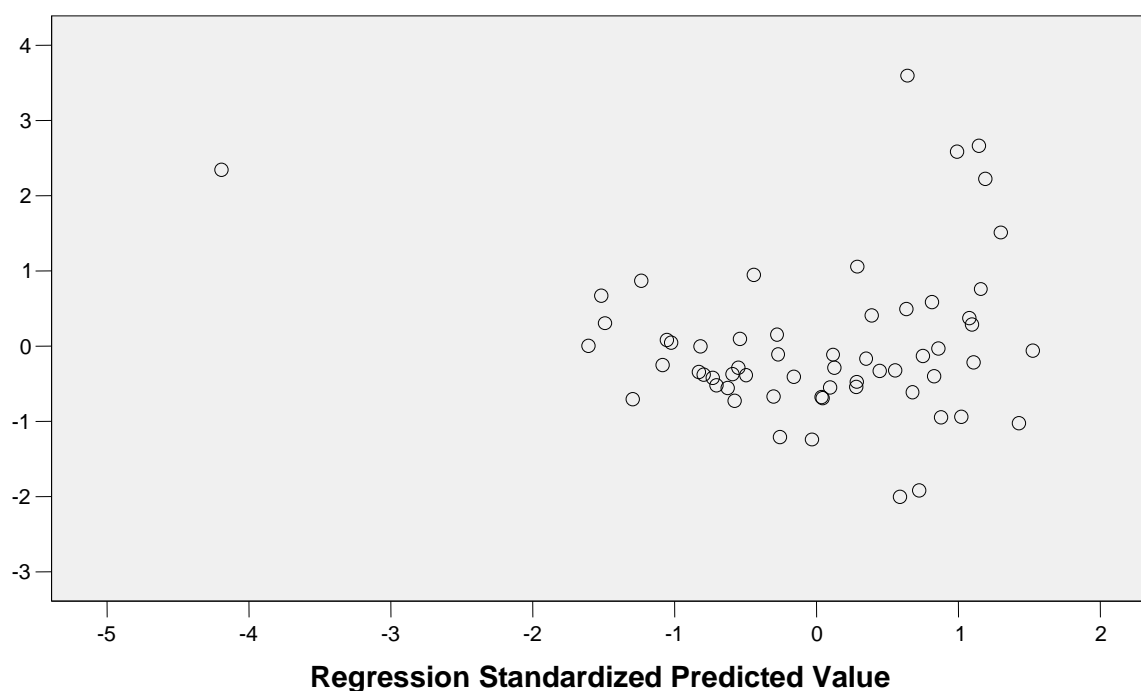
Model	Tolerance	VIF
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1)	0,322	3,102
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	0,904	1,107
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	0,341	2,933

Sumber : Output SPSS

Dari Tabel 4.2 didapat nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 yang artinya model regresi tidak terdapat multikolonieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada tidaknya *heteroskedastisitas* dapat dilihat dari metode grafik *scatter plot*. Apabila terjadi pola yang beraturan antar titik-titik maka terjadi *heteroskedastisitas* tetapi jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.



Gambar 4.1. Grafik Scatter plot

Sumber: Output SPSS

Dari Gambar 4.1 terlihat titik-titik atau data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk lebih meyakinkan kesimpulan, dilakukan uji lain dengan menggunakan uji *Glejser* yaitu dengan meregresikan variabel *independent* dengan nilai *absolute residual*.

Tabel 4.3. Hasil Uji *Glejser*

Model	t	Sig
-------	---	-----

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1)	1,350	0,182
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	-1,533	0,126
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	1,471	0,147

Sumber: Output SPSS

Dari Tabel 4.3 didapat nilai Sig. dari semua variabel bebas  $> \alpha$  (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan *Durbin-Watson (D-W) Test*, yaitu dengan membandingkan nilai D-W (d) dengan  $d_L$  (batas bawah) dan  $d_U$  (batas atas) tertentu.

Tabel 4.4. Hasil Uji *Durbin-Watson (D-W)*

Model	Durbin Watson
1	1,899

Sumber: Output SPSS

Dari Tabel 4.4 didapat nilai *Durbin-Watson (D-W)* adalah 1,899. Nilai  $d_L$  sebesar 1,5245 dan  $d_U$  sebesar 1,7028 sehingga  $1,7028 (d_U) < 1,899 (d_W) < 2,972 (4-d_U)$  artinya tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif pada model regresi.

### Analisis Deskriptif

Dalam melakukan analisis deskriptif didasarkan pada hasil perhitungan statistic deskriptif seperti tercantum dalam table 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5. Statistik Deskriptif

Model	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Rasio Pertumbuhan APBD	1,92	76,12	23,46	15,99
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	6,48	39,24	18,58	7,20
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	6,87	256,66	74,88	43,37
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	177,42	940,24	454,46	195,85

Sumber : Output SPSS

#### 1. Rasio Pertumbuhan APBD

Berdasarkan table 4.5 di atas dapat dilihat bahwa variabel Rasio Pertumbuhan APBD mempunyai nilai minimal 1,92 dan maksimal 76,12. Nilai rata-ratanya sebesar 23,46 dan sebaran data terhadap rata-ratanya sebesar 15,99.

#### 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai nilai minimal 6,48 dan maksimal 39,24. Nilai rata-ratanya sebesar 18,58 dan sebaran data terhadap rata-ratanya sebesar 7,20.

#### 3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Variabel Rasio Efektivitas Keuangan Daerah mempunyai nilai minimal 6,87 dan maksimal 256,66. Nilai rata-ratanya sebesar 74,88 dan sebaran data terhadap rata-ratanya sebesar 43,37.

#### 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah mempunyai nilai minimal 177,42 dan maksimal 940,24. Nilai rata-ratanya sebesar 454,46 dan sebaran data terhadap rata-ratanya sebesar 195,85.

### Analisis Verifikatif

#### 1. Uji t-Statistik

Uji statistik ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel independen. Dalam uji t digunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = 0$ : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.

$H_1: \beta_1 \neq 0$ : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.

$H_0: \beta_2 = 0$ : Efektivitas Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.

$H_1: \beta_2 \neq 0$ : Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.

$H_0: \beta_3 = 0$ : Efisiensi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.

$H_1: \beta_3 \neq 0$ : Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.

a) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima

b) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

Dalam Table 4.6 berikut ini ditampilkan table Uji t

Tabel 4.6. Uji t

Model	t	Sig
Constant	2,606	0,012
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1)	0,399	0,691
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2)	-4,863	0,000
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3)	-0,90	0,928

Sumber : Output SPSS

Hasil uji t pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1)  $> \alpha$  yaitu  $0,691 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD (Y).
- Untuk Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2)  $< \alpha$  yaitu  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang artinya variabel Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD (Y).
- Untuk Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3)  $> \alpha$  yaitu  $0,928 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD (Y).



Berdasarkan hasil uji t juga dapat dibuat persamaan regresi:

Rasio Pertumbuhan APBD = 2,606 – 4,863 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

## 2. Uji F-Statistik

Uji ini menunjukkan apakah semua variabel dependen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel independen. Dalam uji F digunakan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$  : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$  : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.

a) Jika probabilitas > 0,05 maka  $H_0$  diterima

b) Jika probabilitas < 0,05 maka  $H_0$  ditolak

Tabel 4.7 Uji F

Model	Sum of	df	Mean Square	F	Sig
Regresi	4645,775	3	1548,592	8,305	0,000
Residual	10441,590	56	186,457		
Total	15087,364	59			

Sumber: Output SPSS

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung adalah 8,305 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara simultan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dengan nilai  $R^2$  adalah 0,064 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh kontribusi sebesar 6,4% terhadap variabel Rasio Pertumbuhan APBD, sedangkan 93,6 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang ada di dalam penelitian.

## Pembahasan

### 1. Pembahasan Deskriptif

Studi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada untuk digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

#### a. Rasio Pertumbuhan APBD

Dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 23,46% berdasarkan perhitungan statistik deskriptif. Berdasarkan teori pertumbuhan menurut Halim (2008: 235) Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Jadi semakin tinggi tingkat pertumbuhan menunjukkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah.

#### b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Widodo (Halim, 2008: 234) kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Nilai rata-rata rasio kemandirian pada APBD Kabupaten Karawang sebesar 18,58 %, hal ini menunjukkan pola hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat memiliki pola hubungan instruktif dimana peranan Pemerintahan pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah daerah. Berdasarkan table 2.1 pada halaman 58 tentang pedoman penilaian kemandirian keuangan daerah berada pada tingkat kemandirian 0-25 % dalam hal ini kemampuan daerah masih sangat rendah.

**c. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Nilai rata-ratanya sebesar rasio efektivitas terhadap PAD sebesar 74,88 %. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan Asli daerah (PAD) efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100 %. Dengan demikian semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintahanpun semakin baik (Halim, 2008: 234). Kondisi rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Karawang berada pada kriteria kurang efektif karena berada pada range 60 – 80 % (lihat tabel 2.2).

**d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Nilai rata-rata rasio efisiensi keuangan Kabupaten Karawang sebesar 454,46. Masuk dalam kriteria tidak efisien. Hal ini didasarkan pedoman penilaian efisiensi keuangan daerah (lihat tabel 2.3). Hal ini mengingatkah bahwa Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Menurut Halim (2008: 234).

## **Pembahasan Verifikatif**

### **1. Pengaruh secara Parsial**

**a. Pengaruh rasio kemandirian terhadap rasio pertumbuhan**

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_1$ )  $> \alpha$  yaitu  $0,691 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_1$ ) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD ( $Y$ ). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan APBD hanya sebesar 23,46% sedangkan Nilai rata-rata rasio kemandirian pada APBD Kabupaten Karawang sebesar 18,58 %, berada pada kriteria sangat rendah. Maka pengaruh tingkat kemandirian terhadap pertumbuhan APBD tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Mesak Borolayuk (2016) dan Renny Nur'ainy (2013).

**b. Pengaruh rasio efektivitas terhadap rasio pertumbuhan**

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah ( $X_2$ )  $< \alpha$  yaitu  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang artinya variabel Rasio Efektivitas Keuangan Daerah ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD. Dalam penelitian ini diperoleh rata-rata rasio efektivitas berada pada range 60-80 % dengan kriteria kurang efektif artinya tidak berada di bawah 60 % (Tidak Efektif), sehingga masih memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan APBD, hal ini senada dengan penelitian Aula Ahmad Hafidh (2013)

**c. Pengaruh rasio efisiensi terhadap rasio pertumbuhan**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ( $X_3$ )  $> \alpha$  yaitu  $0,928 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ( $X_3$ ) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD ( $Y$ ). Dalam penelitian ini rasio efisiensi berada pada kriteria tidak efisien karena berada di atas 100 % dibandingkan dengan rasio pertumbuhan APBD hanya sebesar 23,46% maka secara

parsial tidak berpengaruh signifikan. Sesuai dengan penelitian Sylvia Febriany Gerungan (2015).

## **2. Pengaruh Secara Simultan**

Nilai F-hitung adalah 8,305 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara simultan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD. Sesuai dengan penelitian Cherry Dhia Wenny (2012).

Sedangkan berdasarkan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dengan nilai  $R^2$  adalah 0,064 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh kontribusi sebesar 6,4% (0,064) terhadap variabel Rasio Pertumbuhan APBD, sedangkan 93,6 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang ada di dalam penelitian.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Rasio Pertumbuhan APBD periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Karawang berada pada tingkat kemandirian sangat rendah. Rasio efektivitas berada pada kriteria kurang efektif. Rasio efisiensi keuangan daerah masuk dalam kriteria tidak efisien, berada pada kriteria daerah Rasio Efektivitas Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD, sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD;
2. Rasio pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang tahun anggaran 2009 – 2014 menunjukkan angka rata-rata sebesar 23,46 %
3. Pengaruh parsial Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap pertumbuhan APBD tidak berpengaruh signifikan. Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah terhadap pertumbuhan APBD berpengaruh signifikan. Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Karawang tidak berpengaruh signifikan.

Sedangkan pengaruh secara simultan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Karawang berpengaruh signifikan.

Besaran nilai koefisien determinasi sebesar 0,064 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh kontribusi sebesar 6,4% terhadap variabel dependen, sedangkan 93,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya dapat disarankan sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Karawang dengan langkah meningkatkan potensi daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah

sehingga tidak terlalu mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Meningkatkan Rasio efektivitas dengan langkah membuat target Pendapatan Asli Daerah yang realistis sesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Meningkatkan Rasio efisiensi keuangan daerah dengan menyusun anggaran yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah yang sesuai sehingga tidak terdapat defisit.

2. Tingkat rasio pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang masih di bawah 30 % yaitu 23,46 %, berarti perlu terus meningkatkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yaitu secara kuantitatif dengan menambah Pendapatan Asli Daerah sedangkan secara kualitatif menunjukkan pembelanjaan yang efektif dan efisien sehingga pencapaian visi dapat terlaksana.
3. Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh kontribusi sebesar 6,4% terhadap variabel Rasio Pertumbuhan APBD, hal ini menunjukkan bahwa kualitas APBD Kabupaten Karawang masih kurang baik, oleh karena itu Pemda Karawang perlu secara intensif melakukan pelatihan manajemen keuangan untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang menangani keuangan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta
- Bambang Riyanto, (2008), *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi. Kedelapan*, BPFE: Yogyakarta
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- BPKP, 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta.
- Darise, Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit PT Indeks, 2006.
- Darsono P, (2010) *Manajemen Keuangan*, Gramedia. Jakarta
- Halim, Abdul & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2008. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Kifliansyah, 2009. *Manajemen Fiskal Kabupaten Sungai Tengah Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, PDII-LIPI
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*,. Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Mamesa. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan daerah*. Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta.

- Marihot Manullang dan Dearlina Sinaga, 2005, pengantar manajemen keuangan,,: Andi, Yogyakarta*
- Moh. Nazir. Ph.D, 2005, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mursyidi, 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara*.
- Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Robbins dan Coulter, 2010. Manajemen (edisi kesepuluh) Erlangga, Jakarta
- Silalahi. 2011, Asas-Asas Management, Bandung : Refika Aditama
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: FE UI.
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2006. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan,. Edisi 5, UPP STIM
- YKPN, Yogyakarta
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis. CV Alfabeta, Bandung.
- Suwatno dan Donni (2011. Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis.: Alfabeta, Bandung
- Swastha, Basu; Ibnu Sukotjo, 2002 : *Pengantar Bisnis Modern* Edisi Ketiga, Cetakan kesepuluh, Liberty, Yogyakarta.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas.: PT Bumi
- Aksara. Jakarta
- Van Horne, James C., 2002, Financial Management and Policy, 12th Edition, Prentice Hall International, Inc., New Jersey.*
- Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.

### **Jurnal dan Proceeding**

- Aula Ahmad Hafidh (2013) dalam Jurnal Penelitian Humaniora Vol.18, 2 Oktober 2013
- Cherry Dhia Wenny (2012) dalam Jurnal Ilmiah Forum Bisnis dan Kewirausahaan Vol.2 1 September 2012
- Mesak Borolayuk (2016) dalam Jurnal Riset Unibos Makassar. Vol. 1 No.014 2016
- Renny Nur'ainy (2013) dalam Proceeding Pesat Vol.5 Oktober 2013
- Sylvia Febriany Gerungan (2015) dalam ejournal.unsrat.ac.id